

**T E S I S**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
MINAT STUDI PERADILAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2015**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

**T E S I S**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Hukum  
Minat Studi Peradilan Pada Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
MINAT STUDI PERADILAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2015**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Tesis ini telah disetujui  
Tanggal 7 Desember 2015**

Oleh :

**Dosen Pembimbing**

  
**Dr. Agus S.H., M.H.**  
**NIP. 19680323 197203 2 002**

Mengetahui,

**Kejurusan Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

  
**Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**  
**NIP. 19650419 199002 1 001**

ii

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji,**

**Pada tanggal 7 Desember 2015**

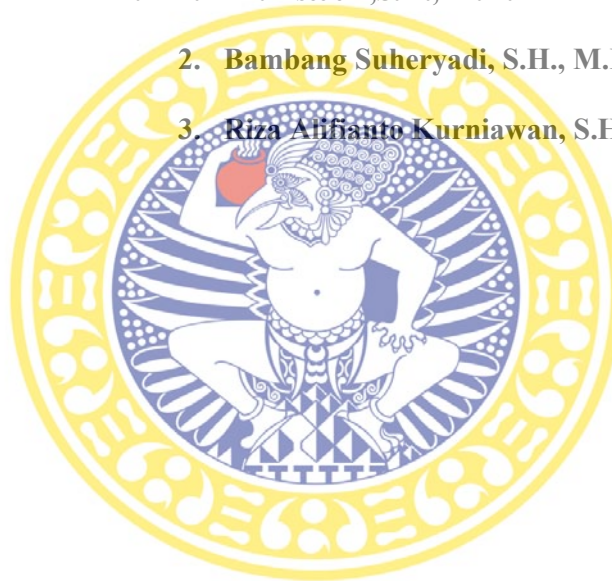
**PANITIA PENGUJI TESIS :**

**Ketua : Dr. Sawirini, S.H., M.S**

**Anggota : 1. Dr. Astutik, S.H., M.H.**

**2. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum**

**3. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP**



## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Hari, Tanggal : Senin, 7 Desember 2015  
Pukul : 13.00 WIB  
Ruang : 108 (Gedung B Fakultas Hukum)

Nama Mahasiswa : Ivan Kusuma Yuda, S.H  
NIM : 031324153061

Judul : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penyalagunaan  
Narkotika

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 7 Desember 2015

Yang membuat pernyataan,



Ivan Kusuma Yuda, S.H  
NIM. 031324153061

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang disparitas penjatuhan pidana oleh hakim terhadap kasus-kasus narkoba. Disparitas penjatuhan pidana ini merupakan penelitian hukum normatif dan sosiologis, dengan pertimbangan untuk menginventarisasi dan mengukur tingkat sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang narkoba mengenai disparitas pemidanaan, baik itu dari segi komponen struktural, substansif dan kultural serta untuk menemukan uapay penyelesaian yang nantinya diharapkan dapat direkomendasikan sebagai kebijakan hukum pidana. Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data skunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari data primer dan juga data empiris yang berasal dari responden.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat seringkali terjadi disparitas pemidanaan oleh hakim dalam kasus-kasus narkoba yang cenderung mengabaikan nilai-nilai keadilan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pemidanaan adalah karena peraturasan perundang-undangan itu sendiri, kurangnya sumber daya aparat penegak hukum, opini publik terhadap sistem peradilan yang kolusif dan adanya pertimbangan tentang diri terdakwa. Disparitas pemidanaan ini juga dapat menimbulkan dampak yang positif dan dampak negatif bagi pelaku tindak pidana narkoba itu sendiri maupun bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, sasaran yang ingin dicapai dalam rangka menggeleminir terjadinya disparitas pemidanaan adalah diharapkan adanya standar pemidanaan terhadap klasifikasi perbuatan pidana dengan melihat berat atau ringannya delik, cara delik itu dilakukan, peranan pelaku dalam delik tersebut, keadaan pribadi diri pelaku, ukuran terhadap berat atau ringannya barang bukti, dan lain-lain. Kemudian dipersempitnya jarak antara pidana minimal dan maksimal, adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja aparat penegak hukum khususnya kepada hakim oleh pihak-pihak yang berwenang untuk itu, sehingga pada akhirnya dapat mencegah terjadinya disparitas pemidanaan yang tidak reasonable.

***Kata Kunci : Disparitas, Penjatuhan Pidana, Hakim dan Narkoba.***

**ABSTRACT**

*This study reviews a disparity of sentences by judge in narcotici cases. Disparity in indictment verdict includes a study of normative law and sociology in a consideration to inventory and measure synchronization rate among the laws related to narcotics in terms of structural, substantial and cultural aspects and then finding a solution to be then recommended as a criminal legal policy. This study is emphasized on a library study but which the secondary data or reference would be prominent rather than primary and empirical data collected from the respondent.*

*Based on the findings, it seemed that disparity in indictment verdicts often occurred by judges especially in narcotic cases which tend to exclude justicial values. The causative factors of disparity were due to the existence of the laws themselves such as the lack of human resources of apparatus, public opinions against a colusive justice and even a personal consideration for any individual accused. The disparity also can result in positive and negative impacts either for the doers in narcotics cases or for the society.*

*Based on the description above, the objective to reach for elimination of any disparity is the existences of explicit standardization of indictment in the classification of criminal cases by considering whether the verdict is complicated or not, procedure in implementing the verdict, the role of doers in verdict, personal states of the individual doers, the size of lightness or heaviness of evidences, etc. It also can be implemented by shortening the minimum and maximum criminal, the supervision tighter on the performance of law enforcement agencies, especially to judge by parties authorized for it, which in turn can prevent the disparity that is not reasonable.*

**Keywords : Disparity, Imposition Of Criminal Justice and Narcotics.**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, atas berkah serta kuasanya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak., Selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya
2. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
4. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H., selaku pembimbing penulisan, pembimbing MKPT dan anggota tim penguji tesis yang telah memberikan bimbingan secara langsung dengan kesabaran dan ketekunan.
5. Ibu Dr. Sawirini, S.H., M.H., selaku Ketua tim penguji yang telah memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., M.H., selaku pembimbing MKPT dan anggota tim penguji tesis yang telah memberikan bimbingan secara langsung dengan kesabaran dan ketekunan.
7. Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.H., selaku anggota tim penguji tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan dukungan moril dan bantuan dengan segala ketulusan.
8. Kepada semua dosen Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Kelas Jakarta



Universitas Airlangga, Staf Administrasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan semua pihak, yang telah memberikan bantuannya.

9. Kepada Ayahanda Alm. H. M. Rudy Prajitno, S.H., M.H., Ibunda Almh. Tarti, B.E., Isteri dr. Aji Mustika Ningrum, Anak Regan Artganta Fawwaz serta Kakanda AKBP. Yoga Baskara Jaya, S.H., S.IK. dan keponakan yang kucintai yang telah mendoakan, memberi semangat dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis semenjak mengikuti pendidikan di Pasca Sarjana Universitas Airlangga sampai dengan selesai.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil demi kelancaran penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini meskipun demikian penulis berharap bahwa tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memiliki perhatian akan hukum dan perkembangannya di Indonesia.

Surabaya, 7 Desember 2015

Penulis

Ivan Kusuma Yuda, S.H

**DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN**

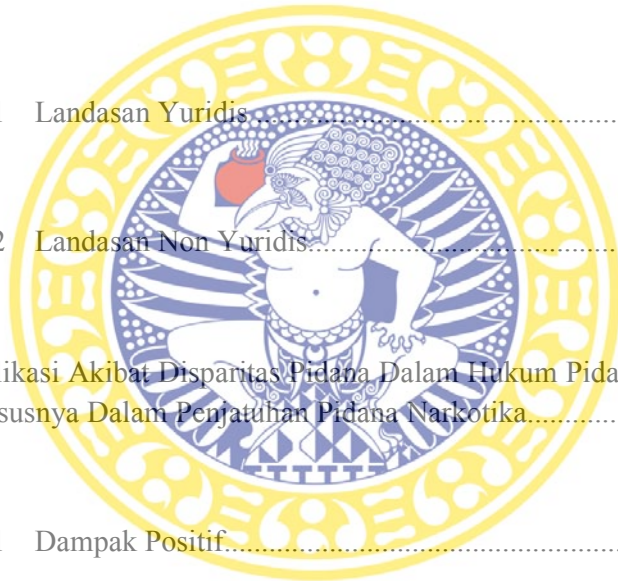
1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2011.



**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALLITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Metode Penelitian.....	17
1.4.1 Tipe Penelitian.....	17
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	18
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	19
1.5 Manfaat Penelitian.....	20
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	20
1.5.2 Manfaat Praktis.....	21
1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	21

1.6	Krangka Teoritik.....	22
1.6.1	Disparitas Pidana.....	22
1.6.2	Putusan Hakim.....	29
1.6.3	Penyalahgunaan Narkotika.....	35
1.7	Sistematika Penulisan.....	38
<b>BAB II Konsep Disparitas Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia.....</b>		<b>40</b>
2.1	Landasan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika di Indonesia Khususnya Dalam Penjatuhan Pidana Narkotika.....	40
2.1.1	Landasan Yuridis.....	40
2.1.2	Landasan Non Yuridis.....	49
2.2	Implikasi Akibat Disparitas Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Khususnya Dalam Penjatuhan Pidana Narkotika.....	70
2.2.1	Dampak Positif.....	70
2.2.2	Dampak Negatif.....	73
2.3	Kebijakan Hukum Pidana Yang Tepat Dalam Rangka Mengeleminir Terjadinya Disparitas Penjatuhan Pidana Khususnya Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dengan Menggunakan Sarana Penal.....	75
2.4	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Mengeleminir Terjadinya Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Menggunakan Sarana Non Penal.....	79



2.4.1	Reformasi Kelembagaan.....	83
2.4.2	Reformasi Peraturan Perundang-undangan.....	87
2.4.3	Budaya Hukum Masyarakat.....	90
<b>BAB III</b>	<b>Ratio Decidendi Terjadinya Putusan Hakim Terhadap</b>	
	<b>Penyalahguna Narkotika.....</b>	<b>94</b>
3.1	Kekuasaan Memutus Perkara Dengan Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Penyalahguna Narkotika.....	94
3.2	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	97
3.2.1	Faktor Individu.....	97
3.2.2	Faktor Sosial Budaya.....	97
3.2.3	Faktor Lingkungan.....	97
3.2.4	Faktor Narkotika.....	98
3.3	Ratio Decidendi Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Penyalahguna Narkotika.....	101
3.3.1	Ratio decidendi yang bersifat yuridis.....	102
3.3.2	Ratio Decidendi yang bersifat Non Yuridis.....	110
3.3.3	Pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.....	112

**BAB IV PENUTUP**

4.1	Kesimpulan.....	130
4.2	Saran.....	133

**DAFTAR BACAAN**

